



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-		-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-		-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-		-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-		-
7	Pajak Air Permukaan		-	-		-
8	Pajak Rokok		-	-		-
9	Pajak Alat Berat		-	-		-
10	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)		-	-		-
11	Retribusi Daerah		4.480.823.000,00	4.857.733.625,00	108,41	4.440.420.000,00
12	Retribusi Jasa Umum		-	-		1.990.420.000,00
13	Retribusi Jasa Usaha		4.480.823.000,00	4.857.733.625,00	108,41	2.450.000.000,00
14	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-		-
15	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-		-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-		-
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-		-
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-		-
19	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		31.807.482.000,00	34.476.647.800,00	108,39	32.488.508.280,00
20	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
21	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
23	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-		-
24	Jasa Giro		-	-		-
25	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-		-
26	Pendapatan Bunga		-	-		-
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-		-
28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		31.807.482.000,00	34.462.553.400,00	108,35	32.476.216.700,00
29	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-		-
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-		-
31	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-		-
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	14.094.400,00		12.291.580,00
33	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-		-
34	Pendapatan dari Pengembalian		-	-		-
35	Pendapatan BLUD		-	-		-
36	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-		-
37	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-		-
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-		-
39	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-		-
40	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-		-
41	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-		-
42	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-		-
43	Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-		-
44	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-		-
45	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		36.288.305.000,00	39.334.381.425,00	108,39	36.928.928.280,00
46						
47	PENDAPATAN TRANSFER					
48	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-		-
49	Dana Perimbangan		-	-		-
50	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-		-
51	Insentif Fiskal		-	-		-
52	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-		-
53	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-		-
54	Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-		-
55	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-		-
56	Pendapatan Bagi Hasil		-	-		-
57	Bantuan Keuangan		-	-		-
58	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-		-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
59						
60	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
61	Pendapatan Hibah		-	-		-
62	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
63	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
64	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-		-
65	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-		-
66	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-		-
67	Dana Darurat		-	-		-
68	Dana Darurat		-	-		-
69	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
70	Lain-lain Pendapatan		-	-		-
71	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-		-
72	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara		-	-		-
73	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat		-	-		-
74	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-		-
75						
76	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		36.288.305.000,00	39.334.381.425,00	108,39	36.928.928.280,00
77						
78	BELANJA DAERAH					
79	BELANJA OPERASI					
80	Belanja Pegawai		45.949.166.000,00	43.130.299.578,00	93,87	43.726.803.656,00
81	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		22.778.857.000,00	21.028.782.710,00	92,32	19.712.377.249,00
82	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		23.170.309.000,00	22.101.516.868,00	95,39	23.337.876.407,00
83	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-		676.550.000,00
84	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-		-
85	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-		-
86	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-		-
87	Belanja Pegawai BOS		-	-		-
88	Belanja Pegawai BOSP		-	-		-
89	Belanja Pegawai BLUD		-	-		-
90	Belanja Barang dan Jasa		146.696.710.000,00	144.936.408.131,00	98,80	138.288.047.894,00
91	Belanja Barang		9.409.066.000,00	9.180.770.393,00	97,57	4.487.993.244,00
92	Belanja Jasa		130.477.083.000,00	129.130.890.387,00	98,97	125.267.349.359,00
93	Belanja Pemeliharaan		4.463.067.000,00	4.312.340.791,00	96,62	3.696.760.340,00
94	Belanja Perjalanan Dinas		2.329.494.000,00	2.294.406.560,00	98,49	4.817.944.951,00
95	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
96	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-		-
97	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-		-
98	Belanja Barang dan Jasa BOSP		-	-		-
99	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-		-
100	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-		-
101	Belanja Bunga		-	-		-
102	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
103	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
104	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
105	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
106	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-		-
107	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-		-
108	Belanja Subsidi		-	-		-
109	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-		-
110	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-		-
111	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-		-
112	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-		-
113	Belanja Hibah		-	-		-
114	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
115	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
116	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-		-
117	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-		-
118	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-		-
119	Belanja Hibah Dana BOS		-	-		-
120	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-		-
121	Belanja Hibah Dana BOSP		-	-		-
122	Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
123	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-		-
124	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-		-
125	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-		-
126	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah-an (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-		-
127	Jumlah Belanja Operasi		192.645.876.000,00	188.066.707.709,00	97,62	182.014.851.550,00

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
128						
129	BELANJA MODAL					
130	Belanja Modal Tanah		-	-		-
131	Belanja Modal Tanah		-	-		-
132	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-		-
133	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.015.098.000,00	3.942.650.361,00	98,20	1.568.709.400,00
134	Belanja Modal Alat Besar		30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	-
135	Belanja Modal Alat Angkutan		2.079.000.000,00	2.078.150.000,00	99,96	-
136	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-		-
137	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-		-
138	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		487.000.000,00	457.700.061,00	93,98	571.175.000,00
139	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		43.500.000,00	43.440.000,00	99,86	-
140	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-		-
141	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-		-
142	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-		-
143	Belanja Modal Komputer		33.500.000,00	31.413.000,00	93,77	80.740.000,00
144	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-		-
145	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-		-
146	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-		-
147	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-		-
148	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-		-
149	Belanja Modal Alat Peraga		-	-		-
150	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-		-
151	Belanja Modal Rambu-rambu		1.342.098.000,00	1.301.977.300,00	97,01	916.794.400,00
152	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-		-
153	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-		-
154	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		-	-		-
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-		-
156	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		15.268.915.000,00	15.130.613.996,00	99,09	6.272.377.280,00
157	Belanja Modal Bangunan Gedung		15.268.915.000,00	15.130.613.996,00	99,09	6.272.377.280,00
158	Belanja Modal Monumen		-	-		-
159	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-		-
160	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-		-
161	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-		-
162	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-		-
163	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-		-
164	Belanja Modal Bangunan Air		-	-		-
165	Belanja Modal Instalasi		-	-		-
166	Belanja Modal Jaringan		-	-		-
167	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-		-
168	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-		-
169	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-		-
170	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-		-
171	Belanja Modal Hewan		-	-		-
172	Belanja Modal Biota Perairan		-	-		-
173	Belanja Modal Tanaman		-	-		-
174	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-		-
175	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-		-
176	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-		-
177	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-		-
178	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		-	-		-
179	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-		-
180	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-		50.987.850,00
181	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-		50.987.850,00
182	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-		-
183	Jumlah Belanja Modal		19.284.013.000,00	19.073.264.357,00	98,91	7.892.074.530,00
184						
185	BELANJA TIDAK TERDUGA					
186	Belanja Tidak Terduga		-	-		-
187	Belanja Tidak Terduga		-	-		-
188	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-		-
189						
190	BELANJA TRANSFER					
191	Belanja Bagi Hasil		-	-		-
192	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-		-
193	Belanja Bantuan Keuangan		-	-		-
194	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-		-
195	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-		-
196	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-		-
197	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-		-
198	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-		-
199	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota		-	-		-
200	Jumlah Belanja Transfer		-	-		-
201						
202	JUMLAH BELANJA DAERAH		211.929.889.000,00	207.139.972.066,00	97,74	189.906.926.080,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
203						
204	SURPLUS/DEFISIT		(175.641.584.000,00)	(167.805.590.641,00)	95,54	(152.977.997.800,00)
205						
206	PEMBIAYAAN DAERAH					
207	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
208	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-		-
209	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-		-
210	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-		-
211	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-		-
212	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
213	Penghematan Belanja		-	-		-
214	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terealisasi		-	-		-
215	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
216	Sisa Belanja Lainnya		-	-		-
217	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-		-
218	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
219	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
220	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		-
221	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
222	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
223	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-		-
224	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
225	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
226	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
227	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
228	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
229	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
230	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
231	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
232	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-		-
233	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-		-
234	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-		-
235	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-		-
236	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
237	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
238	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-		-
239	Divestasi BLUD		-	-		-
240	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-		-
241	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat		-	-		-
242	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
243						
244	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
245	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
246	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
247	Penyertaan Modal Daerah		-	-		-
248	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
249	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
250	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-		-
251	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
252	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
253	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
254	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
255	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
256	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
257	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
258	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
259	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-		-
260	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-		-
261	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-		-
262	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-		-
263	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
264	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
265	Pinjaman BLUD		-	-		-
266	Investasi BLUD		-	-		-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
267	Pembentukan Dana Abadi Daerah		-	-		-
268	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-		-
269	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-		-
270	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat		-	-		-
271	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
272						
273	PEMBIAYAAN NETTO		-	-		-
274						
275	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(175.641.584.000,00)	(167.805.590.641,00)	95,54	(152.977.997.800,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
NIP. 19660801 199603 1 004